

# PEMIKIRAN KI BAGOES HADIKOESOEMO MENGENAI KONSEP NEGARA

**Wildan Nurul Fajar**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP  
Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
email: wildannurulfajar.wnf@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This research aims to describe, analyze, and formulate Ki Bagoes Hadikoesoemo's political thinking about the State of Indonesia. This study uses a critical character study method which is one of the types of qualitative research. Data collection and information techniques used include study documentation and interviews. The results of the study showed that Ki Bagoes Hadikoesoemo had an important role in the formulation of the basic state of Indonesia in the Jakarta Charter. Ki Bagoes Hadikoesoemo had an important role in the first Sila Pancasila change as it is now. In Muhammadiyah, Ki Bagoes Hadikoesoemo has put *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* as the foundation of Muhammadiyah's ideals in developing the country as stated in the articles of association Muhammadiyah's.*

**Keywords:** *Political Thought, Ki Bagoes Hadikoesoemo, State Concept, Muhammadiyah*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memformulasikan pemikiran politik Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai konsep Negara. Penelitian ini menggunakan metode studi tokoh kritis yang merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan meliputi studi dokumentasi dan wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat peranan sangat besar yang dilakukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam menyuarakan pemikirannya mengenai dasar negara Indonesia dalam rumusan Piagam Jakarta. Ki Bagoes Hadikoesoemo memberikan peran penting dalam perubahan Sila pertama Pancasila seperti yang dikenal sekarang. Dalam Muhammadiyah Ki Bagoes Hadikoesoemo telah meletakkan *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* sebagai tonggak dasar dari

cita Muhammadiyah dalam membangun negara sebagaimana yang tercantum dalam muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah.

*Kata Kunci: Pemikiran Politik, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Konsep Negara, Muhammadiyah*

## **PENDAHULUAN**

Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan sejak awal berjuang dalam pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Muhammadiyah merupakan bagian integral dari bangsa yang telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara – bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peran Muhammadiyah adalah sangat strategis dalam mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Muhammadiyah telah mengarungi bahtera kehidupan selama lebih dari satu abad, dengan gelombang pasang dan surut silih berganti. Adalah menarik untuk dicatat bahwa Muhammadiyah yang dibidani kelahirannya oleh K.H Ahmad Dahlan pada 1912, usianya lebih tua tiga puluh tiga tahun dibandingkan dengan lahirnya negara bangsa (*nation-state*) Republik Indonesia, yang baru merdeka pada 1945. Oleh karena itu, Muhammadiyah dapat dipandang sebagai salah satu pilar yang ikut mendirikan rumah RI. Kontribusi Muhammadiyah tidak kecil dalam proses pembentukan RI hingga sekarang. Kontribusi itu dipancarkan, antara lain melalui keterlibatan elit tokoh atau pemimpin Muhammadiyah yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Jika kita menengok kembali sejarah, peran Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam pembentukan negara dapat terlihat ketika perdebatan tentang dasar Negara dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Saat itu, perdebatan diantara para anggota sidang memunculkan dua gagasan utama tentang dasar Negara sebagaimana dikemukakan oleh Anshari (1997:27-

28). Kelompok nasionalis Islam menginginkan agar Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Sedangkan kelompok nasionalis sekuler menginginkan Indonesia sebagai Negara persatuan nasional yang memisahkan antara urusan Negara dan Islam, dengan kata lain: bukan Negara Islam.

Menurut Anshari (1997:34), selain kelompok nasionalis Islam, seperti Kahar Muzakir, Abikoeno Tjokrosoejoso, Agus Salim, Ahmad Soebarjo, dan Wachid Hasyim yang tergabung dalam “Panitia Sembilan” sebagai penggagas Piagam Jakarta, anggota sidang BPUPKI lainnya yang juga mendukung Piagam Jakarta adalah Ki Bagoes Hadikoesoemo, saat itu menjabat ketua PP Muhammadiyah. Kemudian sehari setelah kemerdekaan Tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI yang terdiri dari 21 orang mengadakan sidang untuk menetapkan UUD beserta mukadimah dan persoalan lain yang diusulkan oleh para anggota sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dalam sidang itu, menurut Thaba (1996:47), Mohammad Hatta menyampaikan beberapa usulan perubahan, diantaranya perubahan pada preambule Piagam Jakarta, yaitu anak kalimat: “Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ” diubah menjadi “berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada awalnya, sebagian anggota sidang PPKI terutama Ki Bagoes Hadikoesoemo menolak gagasan Mohammad Hatta. Namun, setelah Bung Hatta, Teuku Muhammad Hasan, Wachid Hasyim, dan Kasman Singodimejo meyakinkan Ki Bagoes dengan berbagai alasan agar jangan sampai pecah dengan non-muslim demi kemerdekaan Indonesia, akhirnya Ki Bagoes menyetujui perubahan tersebut. Akhirnya, syariat Islam sebagai ideologi Negara mengalami kegagalan. Tetapi tak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo sangat sentral dalam proses perumusan Negara Indonesia. Walau tak banyak yang tahu, termasuk warga Muhammadiyah itu sendiri, sila pertama

Pancasila yang sekarang digunakan merupakan hasil rumusan beliau.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, studi tentang dinamika pemikiran politik Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai Negara Indonesia penting untuk dilakukan. Kajian ini berupaya mengungkap bukti historis dari sumber-sumber tekstual (*textual sources*) maupun sumber lisan sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa peran Ki Bagoes Hadikoesoemo sangat penting dalam perumusan Negara Indonesia.

Sesuai dengan hakikat masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “bagaimana pemikiran politik Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai Negara Indonesia?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan memformulasikan pemikiran politik Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai konsep Negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi tokoh kritis yang merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Dalam studi ini kapasitas peneliti adalah untuk menginterpretasikan dan menganalisis perjalanan seorang tokoh secara kritis.

Teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi dokumentasi dan wawancara. Dalam studi dokumentasi peneliti memanfaatkan sumber-sumber catatan dan dokumen (*non human resources*) berupa dokumen Muhammadiyah, buku-buku tulisan Ki Bagoes atau penulis lain tentang Ki Bagoes, Majalah *Suara Muhammadiyah*, literatur, makalah, jurnal, dan hasil penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (1985: 276-277) “catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari kejadian-kejadian tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban”.

Sedangkan pada proses wawancara subjek penelitian yang diwawancarai

adalah keluarga Ki Bagoes Hadikusumo atau orang-orang yang pernah dekat dengan beliau. Tujuannya ialah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi perorangan, cita-cita, gagasan, perasaan, motivasi, tuntutan, pendapat, dan kepedulian para subjek penelitian tersebut terhadap pemikiran politik Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Subjek penelitian dalam rancangan disertasi ini adalah tokoh intelektual Muhammadiyah yaitu Ki Bagoes Hadikoesoemo terkait dengan pemikiran, perjalanan kehidupan dan interaksinya dengan realitas sosial politik yang mengitarinya. Penelitian ini akan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh pemikiran dan aktivitas yang dilakukan oleh tokoh tersebut terhadap pengembangan konsep mengenai Negara Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (2007: 16-19) yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo mengenai Islam dan Negara**

Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan tokoh vokal yang mewakili golongan Islam. Dalam sidang BPUPKI pada 31 Mei 1945 pukul 15.00 mengeluarkan pernyataan yang intinya “membangun negara di atas dasar ajaran Islam” (Hadikusuma, t.t: 1). Sebanyak enam kali dalam bentuk pernyataan, yaitu sebagai berikut: Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini (Hadikusuma, t.t: 13).

Menurut Ki Bagoes, umat Islam adalah umat yang mempunyai cita-cita yang luhur dan mulia sejak dahulu hingga sekarang ini, seterusnya pada

masa yang akan datang, yaitu dimana ada kemungkinan dan kesempatan pastilah umat Islam akan membangunkan negara atau menyusun masyarakat yang didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam (Hadikusuma, t.t: 15). Gagasan Ki Bagoes Hadikoesoemo yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara tersebut didasarkan pada alasan sosiologis-historis dan alasan pemahaman atas ajaran Islam.

Secara sosiologis-historis, menurut Ki Bagoes Hadikoesoemo, agama Islam paling tidak sudah enam abad menjadi agama bangsa Indonesia, atau setidaknya sudah tiga abad sebelum belanda menjajah. Hukum Islam sudah berlaku di Indonesia dengan sebaik-baiknya serta dapat membawa berkah manfaat dan maslahat bagi rakyat umumnya, di dunia dan di akhirat. Banyak sekali hukum Islam yang sudah menjadi adat-istiadat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan dasar negara Indonesia dengan Jiwa rakyatnya, kata Ki Bagoes Hadikoesoemo, “Tuan-tuan harus mengetahui betul-betul adanya jiwa ke-Islaman rakyat” (Hadikusuma, t.t: 19-20). Ki Bagoes Hadikoesoemo meminta agar tidak salah dalam membaca dan merekam aspirasi penduduknya. Selengkapya Ki Bagoes Hadikoesoemo (t.t: 21) mengatakan:

Selamilah jiwa rakyat sedalam-dalamnya untuk menjadi dasar tata negara kita, supaya nanti negara kita ini dapat menjadi negara yang kuat dan sentosa. Tinggalah di desa-desa dan di kampung-kampung untuk mengetahui keadaan jiwa dan kehidupan murba (rakyat banyak) yang sebenar-benarnya. Disitu tentu tuan-tuan nanti akan mendapati bahwa rakyat yang terbanyak memang berjiwa Islam.

Lebih lanjut Ki Bagoes menguraikan bagaimana jiwa Islam itu tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dapat dilihat dari adanya pengaruh agama Islam yang sangat kuat dan mendalam pada rakyat Indonesia. Pada bagian lain, Ki Bagoes Hadikoesoemo menyatakan kekhawatirannya apabila negara ini tidak berdiri diatas agama Islam. Bila

demikian halnya, menurutnya, mayoritas penduduk yang muslim ini akan bersikap dingin, pasif dan tidak mengambil peran pro-aktif dalam pembangunan (Hadikusuma, t.t: 22). Pandangan sosiologis-historis Ki Bagoes Hadikoesoemo sebagai landasan tesisnya tentang Islam sebagai dasar negara ternyata cocok dengan pandangan mitra selembaga, Muzakir. Menurut Muzakir (Syaifullah, 2015: 75), Islam yang tersiar di Indonesia dan Melayu sejak lebih dari tujuh abad silam merupakan suatu kenyataan tidak dapat dibantah. Bahwa hampir 90 persen bangsa Indonesia dan Melayu telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan memeluk agama Islam.

Alasan pemahaman atas ajaran Islam bagi Ki Bagoes Hadikoesoemo, Islam dijadikan dasar negara berdasar pada pemahaman atas ajaran Islam secara substansial dan menyeluruh, Baginya, substansi dan sistematika ajaran Islam meliputi : iman, ibadah, amal saleh dan jihad, Empat aspek ajaran ini merupakan ringkasan ajaran Islam yang telah diajarkan dan dipimpinkan oleh para *nabiyullah* dalam rangka memperbaiki masyarakat atau negara.

## **2. Pemikiran Ki Bagoes Hadikusumo tentang *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur***

Menelusuri pemikiran politik Muhammadiyah mengenai negara Indonesia tentu dapat dirunut dari cita Muhammadiyah dalam membangun negara sebagaimana yang tercantum dalam muqaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, yaitu negara “*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*”. Walaupun istilah *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* ini bukan istilah yang pertama kali ditemukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo, namun pemikiran mengenai konsep *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* pertama kali ditafsirkan oleh Ki Bagoes

Hadikoesoemo. Hal ini juga dibenarkan oleh Muhammad Nuski salah satu cucu Ki Bagoes Hadikoesoemo. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh peneliti bahwa konsep *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* ini kemudian menjadi akar dari lahirnya berbagai konsep negara menurut Muhammadiyah karena pada semua konsep negara yang dilahirkan oleh Muhammadiyah, selalu ditujukan pada tercapainya negara *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.

Sebagaimana yang tertuang dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* diartikan sebagai “suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun”. Tafsir mengenai *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* dibahas secara mendalam dalam bukunya Ki Bagoes Hadikoesoemo yang berjudul “Islam sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin”. Oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo istilah *Baldatun Thajjibah* diartikan sebagai “negeri yang baik”. Thajjibah mengandung arti: berfaedah, bagus dan bersih serta tidak ada mengandung mudarat. *Baldatun Thajjibah* atau Negeri yang baik ialah negeri yang memberi manfaat kepada segenap rakyatnya, bagus dan rapih aturan serta susunannya, bersih dari undang-undang dan perlakuan yang tidak adil, diperintah serta diatur dengan ikhlas bersih dari kepentingan perorangan atau golongan sehingga tidak memberi mudarat kepada rakyat umumnya. Sedangkan *Rabbun Ghafur* ialah Allah yang Maha Pengampun, yang melindungi hamba-Nya yang beriman dan berbuat kebaikan, berbakti kepada-Nya dan mau menerima serta menjunjung tinggi hukum-hukum-Nya.

Menurut pandangan Ki Bagoes Hadikoesoemo negeri yang baik pasti mendapat perlindungan dengan Allah yang Maha Pengampun sebab negeri itu disusun dan diatur dengan berpedoman pada hukum-hukum Allah.

Negeri ataupun negara ialah masyarakat yang dibuat dan diatur oleh manusia, diperbaiki dan dimaksudkan oleh manusia juga, dan apabila masyarakat itu rusak binasa maka manusia juga yang merusaknya. Tidak kuasa manusia menahan kerusakan yang dibuat oleh manusia lainnya. Beberapa golongan manusia berkata hendak memperbaiki masyarakat tetapi dalam pratiknya merusak dan menambah keruhnya suasana, baik disengaja atau tidak. Beberapa golongan berkata hendak melindungi, tetapi sebenarnya menganiaya dan memeras. Beberapa golongan berkata akan membela dan menjelmakan keamanan, tetapi sebenarnya untuk mengabdikan kekuasaan dan keunggulannya, serta menambah atau setidaknya menjaga agar daerah kekuasaannya tidak berkurang. Salah satu pihak mengatakan keadaan masyarakat rusak dan buruk, pihak lain mengatakan itulah yang baik dan maju.

Kaitannya dengan kondisi tersebut, menurut Ki Bagus, “manusia memerlukan norma-norma agama yang berisi hukum-hukum Allah, karena bila memakai pendapat manusia tentulah yang diperoleh tidak akan tepat dan benar. Kekacauan dan keributan bukanlah disebabkan perselisihan pendapat manusia, bila manusia telah mau mengembalikan pendapatnya kepada hukum-hukum Allah, bila masyarakat telah diatur dan disusun dengan berpedoman hukum-hukum Allah, niscaya aman dan sejahteralah dunia; itulah juga dikehendaki oleh *Baldataun Thajjibah wa Rabbun Ghafur*. Kedudukan Manusia kepada Hukum Allah menjadi syarat mutlak bagi terciptanya negara yang baik yang berada di bawah perlindungan Allah yang Maha Pengampun. Dalam masyarakat yang agama menjadi dasar dan pedoman, tujuannya tidak hanya diutamakan kepada kesejahteraan lahir yaitu kemakmuran bersama, tetapi juga kesejahteraan batin yang amat dibutuhkan bagi manusia yang hidup. Bahkan dengan tidak adanya

kesejahteraan batin, segala ikhtiar untuk mencapai kemakmuran akan sia-sia belaka, oleh karena hanya manusia yang sederhana dalam kebatinannya dapat merasa makmur dan cukup bila keperluan hidupnya telah dipenuhi, dan merasa bersyukur serta rela menolong orang lain bila yang dimiliki ternyata melebihi dari keperluan hidupnya. Tetapi orang yang batinnya tidak aman, tidak akan merasa cukup meskipun yang telah dimilikinya itu berlebih, bahkan dia masih hendak menambah kekayaannya lagi dengan tidak memikirkan nasib kawan-kawannya yang kekurangan, tidak peduli kepada baik atau buruk, halal atau haram, asal dapat menambah hartanya.

Hukum Allah yang dapat menentukan apakah manusia benar-benar berbuat baik untuk masyarakat atau hanya untuk dirinya. Hukum Allah mengajarkan bahwa menolong dan memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kekurangan itu satu kewajiban, bukan kedermawanan, tetapi satu keharusan yang dilindungi oleh undang-undang. Hukum Allah mengajarkan bahwa segala ketamakan dan aniaya akan dibalas dengan hukuman, meskipun dapat terlepas dari jaring-jaring Undang-Undang ciptaan manusia. Hukum Allah mengajarkan bahwa adanya rumah sakit - rumah sakit, rumah pemeliharaan dan pertolongan, pabrik-pabrik keperluan hidup dan hal-hal yang menjadi kepentingan umum, hukumnya wajib kepada segenap anggota masyarakat untuk mengadakannya. Pemegang kuasa dalam masyarakat berkewajiban melaksanakan ini. Hukum Allah mengajarkan bahwa segala manusia sama harga dan nilainya, tidak seorang lebih mulia dari lainnya, kemuliaan terletak kepada siapa saja yang menjalankan perintah Allah dengan patuh dan mengingkari larangan-Nya dengan hati-hati. Hukum Allah mengajarkan bahwa judi dan arak harus dilarang karena berbahaya kepada manusia dan masyarakat, meski bagaimanapun banyaknya hasil yang diperoleh dari judi dan arak itu, karena tujuan hukum Allah hanya

keselamatan masyarakat bukan banyaknya hasil yang diperoleh dari judi dan arak itu, karena tujuan hukum Allah hanya keselamatan masyarakat bukan banyaknya uang masuk. Hukum Allah mengajarkan bahwa poligami diizinkan dan perzinaan serta pelacuran harus diberantas dan orang yang menjalankannya harus dihukum. Hukum Allah mengajarkan bahwa setiap orang dituntut pertanggungjawabannya mengenai kepemimpinannya dalam keluarganya, pengikut dan rakyatnya. Hukum Allah mengajarkan bahwa segala macam kesenangan hidup itu mubah, artinya boleh dilakukan asal tidak melebihi batas kesusilaan yang telah ditentukan. Hukum Allah memberi garis dengan jelas yang memisahkan antara kemajuan dan kesesatan serta keruntuhan, pemisahan antara hawa nafsu dan kemaslahatan. Dan Akhirnya hukum Allah mengajarkan bahwa kebangsaan tidak boleh dipergunakan untuk memecah belahkan manusia karena akan menimbulkan permusuhan atau merengangkan persaudaraan.

Makna dan esensi yang terkandung dalam *Baldatun Thajjibah wa Rabbun Ghafur* sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo tersebut menjadi ruh dari pergerakan Muhammadiyah dan sekaligus menjadi akar lahirnya pemikiran Muhammadiyah mengenai konsep negara.

### **3. Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam Perumusan Dasar Negara Pancasila**

Berdasarkan kajian yang peneliti lakukan mengenai proses perumusan dasar negara, yang diperkuat dengan temuan-temuan yang ada dalam literatur baik yang bersumber dari Sekretariat Negara Republik Indonesia, buku “Islam Sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin” maupun literatur-literatur lainnya, serta wawancara dengan pihak keluarga Ki Bagoes Hadikoesoemo, didapatkan

keterangan bahwa pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo sangat penting dalam perumusan dasar negara Pancasila.

Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo sudah dilakukan sejak menjadi tokoh bangsa yang ditunjuk untuk beraudiensi dengan Kaisar Jepang Tenno Heika di Tokyo pada Februari 1945 mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum keterlibatannya BPUPKI dan PPKI. Keikutsertaan Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan wujud kecintaannya terhadap tanah air dan bangsanya, yang dilanjutkan melalau pemikirannya dalam merumuskan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945 (sore).

Pemikiran politik yang dianut oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo berpandangan bahwa politik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, kapan dan dimana saja. Politik merupakan suatu strategi untuk tujuan bersama manusia (bukan hanya untuk individu atau golongan) yaitu suatu kehidupan yang berkeadilan, berkesejahteraan, dan berketentraman dan harus dalam bingkai moralitas dan spiritualitas (Yusuf, 2012:101).

Perjuangan yang dilakukan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo dapat terlihat dalam jalannya sidang BPUPKI. Ki Bagoes Hadikoesoemo sangat aktif menyuarakan aspirasi Islam sebagai dasar negara. Menurut pemikirannya pada dasarnya agama Islam mengandung 5 prinsip seperti yang disampaikannya pada sidang BPUPKI periode pertama, yaitu:

1. Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh,
2. Islam mementingkan perekonomian dan mengatur pertahanan negara,
3. Islam membantu membentuk pemerintahan yang adil dan menegakan keadilan,
4. Islam tidak bertentangan bahkan sesuai dengan kebangsaan Indonesia,

5. Islam membentuk potensi lahir dan batin serta semangat kemerdekaan yang menyala.

Selain itu andilnya yang sangat besar juga sangat terlihat setelah hari yang mendebarkan bangsa Indonesia dan menggemparkan dunia yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 sekelompok yang merasa belum puas atas rumusan Dasar Negara yang dihasilkan oleh Badan Penyelidik (dalam hal ini adalah golongan Kristen dari wilayah Indonesia bagian Timur yang disampaikan oleh opsir Jepang) menemui Mohammad Hatta. Perdebatan yang terjadi sebelum jalannya sidang PPKI menunjukkan bahwa Ki Bagoes Hadikoesoemo menjadi satu-satunya tokoh yang menempati posisi sangat menentukan bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Ini dibuktikan dengan apa yang dikatakan oleh Prawoto Mangkusasmito (Anshari, 1997:57) tekanan psikologis tentang hasil penentuan diletakan diatas pundak Ki Bagoes Hadikoesoemo selaku pejuang Islam pada saat itu, karena K.H Wahid Hasyim tidak hadir dalam pertemuan 18 Agustus 1945 itu, karena dia sedang dalam perjalanan ke Jawa Timur, sedangkan Kasman Singodimedjo yang menjadi anggota baru sebagai tambahan baru menerima undangan pada pagi harinya dan dapat dimengerti beliau sama sekali belum siap untuk berurusan dengan masalah ini.

Dari apa yang di sampaikan oleh Teuku Mohammad Hassan mengenai teguhnya pendirian Ki Bagoes Hadikoesoemo, juga dibenarkan mengenai Kasman Singodimedjo yang membujuk Ki Bagoes Hadikoesoemo agar mau merelakan tujuh kata tersebut dihilangkan. Sedangkan Kasman Singodimedjo juga membenarkan dengan menyatakan bahwa istilah “Yang Maha Esa” adalah amandemen yang berasal dari (diajukan oleh) Ki Bagoes Hadikoesoemo.

Jika menilik apa yang terangkum di atas maka dapat dikatakan bahwa Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan seseorang penentu dan seseorang yang

memegang peranan penting dalam menentukan “Ya atau Tidaknya” pencoretan 7 kata yang dipandang prinsip itu, dan merumuskan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sebagai penggantinya. Difahami pula bahwa Ki Bagoes Hadikoesoemo bisa disebut sebagai pemegang kunci kedaulatan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya menurut Projokusumo (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013:75) bahwa kunci Pancasila sebetulnya ada di tangan Ki Bagoes Hadikoesoemo. Jika kunci Pancasila ini tidak diberikan, jika Ki Bagoes Hadikoesoemo menolak usulan pencoretan “tujuh kata” dan jika Ki Bagoes Hadikoesoemo memimpin sebuah perlawanan kepada negara, seperti yang dilakukan oleh Kartosuwiryo karena kekecewaan terhadap proses politik yang terjadi, maka sejarah perkembangan bangsa dan negara Indonesia akan berbeda. Meskipun secara pribadi kecewa, tetapi Ki Bagoes Hadikoesoemo tetap tampil sebagai seorang pemimpin Muslim patriotik dan nasionalis yang sederhana dan ulet yang telah memberikan sumbangan politik dan konstitusional yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

## **SIMPULAN**

Merujuk pada hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa butir simpulan sebagai berikut:

1. Ki Bagoes Hadikoesoemo merupakan tokoh vokal yang mewakili golongan Islam. Menurut pemikirannya, Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini. Pemikirannya tersebut menjadi peletak dasar dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia.
2. Konsep *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* merupakan pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo yang dimasukkannya ke dalam Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Konsep ini

menjadi akar dari lahirnya berbagai konsep negara menurut Muhammadiyah dan selalu menjadi tujuan akhir dari lahirnya setiap konsep negara menurut Muhammadiyah.

3. Pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo sangat penting dalam perumusan dasar negara Pancasila. Pemikirannya mengenai rumusan dasar negara Indonesia memberi warna dalam perdebatan-perdebatan di Sidang BPUPKI. Keputusannya dalam merelakan 7 kata kunci dalam piagam Jakarta dan memilih istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk dijadikan sila pertama Pancasila telah menetakannya sebagai seorang pemimpin Muslim patriotik dan nasionalis yang telah memberikan sumbangan politik dan konstitusional yang sangat besar bagi bangsa Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anshari, E.S, 1997. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bahar, S., A.B. Kusuma, dan N. Hudawati, 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Hadikoesoema, Ki Bagus, (Tanpa Tahun). *Islam sebagai Dasar Negara dan Achlaq Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahaju.
- Hadikusuma, D, 1973. *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan, dan Buah Pikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo*. Yogyakarta: Persatuan.
- Lincoln, Y.S. & Guba, E.G, 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, Sage Publications.

Miles, M.B. & Huberman, A. M, 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dari judul *Qualitative Data Anlysis*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

PP Muhammadiyah, 2013. *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Peran dan Kiprah Ki Bagoes Hadikoesoemo, Mr. Kasman Singodimedjo, dan K.H. Abdul Kahar Mudzakkir*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Syaifullah, 2015. *Pergerakan Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yusuf, H, 2012. Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer: Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global. *TAPIs*. Vol 8. No 2 Desember.